

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Puskesmas Tuntang Kabupaten Semarang merupakan pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kesehatan di wilayah kerja puskesmas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang. Akan tetapi sejak 1 Januari 2017 Pemerintah Kabupaten Semarang mengembangkan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan tujuan efisiensi dan efektifitas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih sejahtera dan untuk mewujudkan *good goverment* dan *clean government*.

Puskesmas Tuntang merupakan Puskesmas rawat jalan yang beralamat di Jalan Fatmawati dusun Petet Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Secara geografis terletak di sebelah timur Rawa Pening tepat di jalan utama yang berbatasan dengan Kota Salatiga. Puskesmas Tuntang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025 Tahun 2023, penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang melibatkan Puskesmas, unit pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer. Terdapat lima klaster pada Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer. Klaster 1 yaitu Manajemen, klaster 2 yaitu Ibu dan Anak, klaster 3 yaitu usia dewasa dan lanjut Usia, klaster 4 yaitu Penanggulangan Penyakit Menular, klaster 5 yaitu Lintas Klaster.

Menurut WHO ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu Penyediaan Air Minum, Pengelolaan air Buangan dan pengendalian pencemaran, Pembuangan Sampah Padat, Pengendalian Vektor, Pencegahan/pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, Higiene makanan, Pengendalian pencemaran udara, Pengendalian radiasi, Kesehatan kerja, Pengendalian kebisingan, Perumahan dan pemukiman, Aspek kesling dan transportasi udara, Perencanaan daerah dan perkotaan, Pencegahan kecelakaan, Rekreasi umum dan pariwisata, Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi/wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk, serta Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.

Kesehatan lingkungan atau pengawasan kualitas lingkungan merupakan salah satu lingkup pelayanan yang terdapat pada Klaster 4. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan terkait Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Pengawasan secara internal dilakukan oleh pelaksana penyelenggara air minum yaitu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan kegiatan penyediaan air minum. Secara nasional, persentase sarana air minum yang diawasi tahun 2022 sebesar 24.295 (68,1%) dari jumlah keseluruhan total sarana air minum sebanyak 35.701 . Angka capaian nasional ini sudah mencapai

target RPJMN tahun 2022 sebesar 68%. Terdapat 1 (satu) provinsi yang memiliki 100% pengawasan pada seluruh sarana air minum yang ada yaitu DKI Jakarta. Sedangkan provinsi terendah dalam pengawasan air minum yaitu Papua Barat (56,1%). Provinsi Jawa Tengah memperoleh persentase sarana air minum yang diawasi tahun 2022 yaitu 68,4%.

Tempat Pengolahan Pangan siap saji yang selanjutnya disebut Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun non komersial. TPP yang menjadi sasaran prioritas pengawasan dan pembinaan adalah TPP komersial. TPP komersial adalah usaha penyediaan pangan siap saji yang memperdagangkan produknya secara rutin, yaitu jasa boga/katering, restoran, TPP tertentu dan Depot Air Minum (DAM), gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, dapur gerai pangan jajanan, dan sentra gerai pangan jajanan/kantin. Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Kedua peraturan tersebut diantaranya mengatur Standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 terdapat perubahan antara lain kategorisasi TPP dan formulir IKL.

Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Oleh karena itu, pengawasan kualitas lingkungan menjadi bagian integral dari pelayanan Puskesmas.

Seiring dengan era digitalisasi, banyak dinas kesehatan di berbagai daerah mendorong Puskesmas untuk menerapkan inovasi pelaporan secara digital agar lebih mudah diakses dan pelaporan dapat dilakukan tepat waktu setiap bulan. Sebagai contoh, Kabupaten Lamongan telah mengembangkan inovasi digital dalam pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis *e-government*. Sementara itu, beberapa Puskesmas lain juga telah mengembangkan inovasi serupa, seperti Puskesmas Pudukpayung di Kota

Semarang dengan inovasi "REBEKA KLENTING" untuk pengelolaan sampah domestik, dan Puskesmas di Kabupaten Kendal yang menggunakan formulir

Sebelum adanya inovasi, sistem pelaporan data program kesehatan lingkungan di UPTD Puskesmas Tuntang masih dilakukan secara manual. Proses ini mengandalkan formulir fisik yang diisi oleh petugas sanitarian setelah melakukan inspeksi di lapangan. Sistem manual ini menimbulkan beberapa kendala signifikan, terutama terkait dengan data. Formulir fisik yang berisi data hasil inspeksi seringkali hilang, rusak, atau tercecer. Hal ini menyebabkan data penting tidak dapat diakses saat dibutuhkan. Akibat kehilangan data, proses rekapitulasi data bulanan menjadi terhambat dan tidak akurat. Petugas membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun laporan, dan data yang disajikan mungkin tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hal ini secara langsung berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak optimal. Ketidakakuratan dan keterlambatan data pelaporan menghambat Puskesmas dalam merespons cepat terhadap masalah kesehatan lingkungan yang berpotensi menyebabkan penyakit menular. Misalnya, jika data kondisi sanitasi di sebuah Tempat Pengolahan Pangan (TPP) hilang, Puskesmas tidak dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga risiko keracunan makanan di masyarakat tetap tinggi. Merespons permasalahan tersebut, inovasi "Darling Mas Tatang" dikembangkan sebagai solusi berbasis digital. Inovasi ini mengubah alur kerja dari manual menjadi digital dengan memanfaatkan platform *Linktree* dan *Google Spreadsheet*.

Setelah adanya inovasi dengan sistem digital, semua data yang diinput oleh petugas sanitarian tersimpan secara otomatis dan aman di *Google Spreadsheet*. Risiko kehilangan atau kerusakan data akibat faktor fisik dapat dihilangkan. Proses rekapitulasi data menjadi otomatis dan *real-time*. Petugas dapat dengan mudah mengakses data kapan saja dan di mana saja, sehingga laporan bulanan dapat dibuat dengan lebih cepat dan akurat. Data yang valid dan cepat memungkinkan Puskesmas untuk melakukan analisis dan intervensi yang tepat. Peningkatan capaian program pada Tempat Fasilitas Umum (TFU), Sarana Air Minum (SAM), dan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) menjadi bukti bahwa inovasi ini tidak hanya memperbaiki sistem pelaporan, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran penyakit yang bersumber dari lingkungan.

Oleh karena itu, inovasi "Darling Mas Tatang" dikembangkan sebagai solusi untuk mengoptimalkan dan mempermudah pelaporan data program kesehatan lingkungan di UPTD Puskesmas Tuntang Kabupaten Semarang, dengan memanfaatkan platform digital untuk pencatatan, penyimpanan, dan rekapitulasi data. Inovasi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelaporan manual dan meningkatkan capaian program kesehatan lingkungan secara signifikan.

## **B. Lingkup Pengabdian Dan Pengembangan**

### **1. Lingkup Pengabdian**

Tugas Sanitarian di Puskesmas Tuntang meliputi pelayanan di dalam gedung dan di luar gedung. Pelayanan di dalam gedung meliputi pengelolaan limbah medis padat dan limbah cair, pengelolaan limbah non medis, dan pelaksanaan laboratorium kesehatan masyarakat. Pelayanan di luar gedung meliputi inspeksi kesehatan lingkungan di tempat umum, fasyankes, sarana air minum, sarana tempat pengelolaan makanan, melakukan pengambilan sampel air dan makanan, pemberdayaan masyarakat mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), melaksanakan Kabupaten Kota Sehat tingkat Kecamatan. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan, harus sesuai dengan SOP yang berlaku.

### **2. Lingkup Pengembangan**

Pelaporan data program kesehatan lingkungan merupakan output dari kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan untuk mengevaluasi hasil kinerja tenaga sanitarian di puskesmas. Maka dari itu, sudah jadi tugas penulis untuk mengoptimalkan sistem pelaporan data program kesehatan lingkungan.

Hasil observasi yang dilakukan, penulis menemukan beberapa kekurangan dalam sistem pelaporan data program kesehatan lingkungan, diantaranya :

- a) Laporan manual sering hilang atau terselip karena penempatannya yang terpisah
- b) Jika ada permintaan data oleh Dinas Kesehatan, harus merekap ulang di laporan digital atau dalam bentuk *google spreadsheets*
- c) Kurangnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Perangkat Daerah yang terlibat

Hasil observasi yang didapatkan, akan ditindaklanjuti menjadi sebuah inovasi yang dapat meningkatkan kinerja Sanitarian di Puskesmas Tuntang. Berdasarkan temuan tersebut, penulis berinovasi untuk mengoptimalkan system pelaporan data program kesehatan lingkungan di Puskesmas Tuntang.

### **C. Tujuan Tugas Akhir**

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam karya kinerja ini adalah mampu mengoptimalkan dan memudahkan pelaporan data program kesehatan lingkungan di Puskesmas Tuntang.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengembangkan sistem pelaporan data program Kesehatan Lingkungan (Tempat dan Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), dan Sarana Air Minum (SAM))
- b. Mencoba Sistem Pelaporan data Program Kesehatan Lingkungan
- c. Mengetahui efektifitas sistem pelaporan program Kesehatan Lingkungan

### **D. Manfaat Tugas Akhir**

#### 1. Institusi Pendidikan

Manfaat dari hasil karya kinerja ini bagi universitas bisa menambahkan salah satu sumber referensi di perpustakaan kampus dan dijadikan salah satu rujukan tentang Sistem pelaporan data program Kesehatan Lingkungan

#### 2. Puskesmas

Hasil karya kinerja ini menjadikan gambaran bahwasanya Sistem pelaporan data program Kesehatan Lingkungan dapat digunakan untuk efektifitas kinerja

#### 3. Mahasiswa

Menjadikan mahasiswa mempunyai pemikiran yang inovatif dan bisa berkarya secara kreatif.